

PENGARUH JUMLAH TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN

**I Putu Antonius Rizky Wahyudi¹
Ni Nyoman Yuliarmi²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

Email: antonrzky123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2) menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 3) menganalisis peran pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengaruh jumlah tenaga kerja dan PMDN terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini berlokasi di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, yang dianalisis dengan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Variabel PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) Variabel jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, 4) Variabel PMDN berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, 5) Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, 6) Pertumbuhan ekonomi memediasi secara signifikan pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, 7) Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi PMDN terhadap tingkat kemiskinan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah investasi hendaknya diarahkan pada wilayah diluar Sarbagita yang memiliki investasi fisik yang rendah agar alokasi investasi merata di seluruh wilayah dan sektor yang ada.

Kata kunci: jumlah tenaga kerja, PMDN, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to 1) analyze the effect of the number of labor and domestic investment on economic growth in Bali Province District / City, 2) analyze the influence of the number of labor, domestic investment and economic growth on poverty levels in Bali Province / City, 3) analyze the role of growth the economy in mediating the effect of the number of labor and domestic investment on poverty levels in Bali's Regency / City This research is located in 9 regencies / cities in Bali Province using data released by the Central Statistics Agency, which is analyzed by path analysis. The results of this study indicate that 1) The variable number of workers has a positive and significant effect on economic growth, 2) The variable PMDN has no significant effect on economic growth, 3) The variable number of workers has a negative and significant effect on poverty levels, 4) The variable PMDN has an effect negative but not significant to poverty levels, 5) Economic growth variables have a negative and significant effect on poverty levels, 6) Economic growth significantly mediates the effect of the number of workers on poverty levels, 7) Economic growth does not mediate PMDN on poverty levels. The advice that can be given is that investment should be directed to areas outside Sarbagita which have low physical investment so that investment allocation is evenly distributed across all regions and sectors.

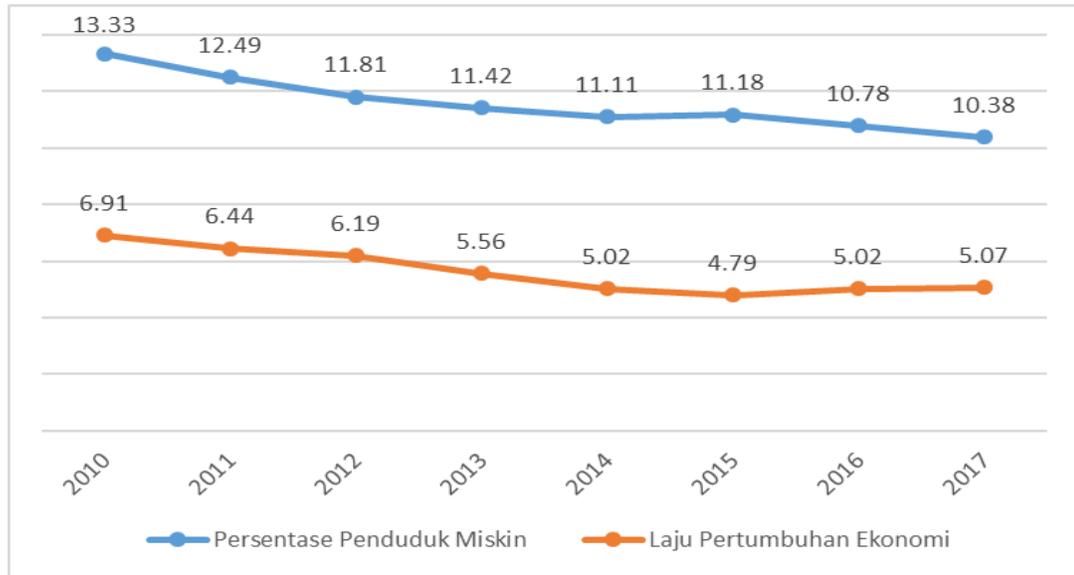
Keywords: labour, domestic investment, economic growth and poverty rate

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi makro yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia (Budhi, 2013). Menurut Sianturi (2011), sumber permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah yang disebabkan oleh ketidakmerataan tingkat distribusi pendapatan, dimana hal tersebut menciptakan kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin semakin melebar, sehingga pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam pembangunan manusia (Fajrii, 2016). Pemerintah baik pusat maupun daerah pasti berusaha untuk selalu mensejahterakan masyarakatnya seperti yang tertera dalam UUD 1945. Salah satu cara yang diambil oleh pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia adalah melalui pembangunan (Putra dan Sri Budhi, 2015). Pembangunan bersifat dinamis dan multidimensional, pembangunan perlu dilakukan guna mencapai sasaran utama yakni mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Seran, 2017). Salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat merasakan kehidupan yang layak adalah melalui pembangunan ekonomi yang merata di setiap wilayah di Indonesia. Pembangunan dapat berupa sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung semua sektor yang ada dan pengentasan masalah kemiskinan guna dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Masih adanya penduduk miskin di beberapa wilayah artinya strategi pemerintah dalam menaikkan taraf hidup masyarakatnya belum efektif diterapkan (Suartha dan Yasa, 2017).

Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi. Berdasarkan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDG'S), menyepakati bahwa kemiskinan di suatu negara harus mengalami penurunan hingga menjadi setengahnya pada tahun 2015 (Todaro, 2000:29). Hal itu disebabkan karena krisis global yang menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang secara langsung juga mengakibatkan tingkat angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Krisis ekonomi juga mengakibatkan Indonesia tertinggal tujuh tahun dibandingkan negara lain dalam membangun daya saing perekonomian nasionalnya (Suryahadi, *et al.*, 2012). Krisis global yang terjadi diberbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, tidak terkecuali negara Indonesia, juga mengalami kenaikan tingkat kemiskinan akibat krisis yang terjadi di berbagai negara (Astrini, 2013). Kenaikan tingkat kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yakni tingkat investasi yang masih dibawah standar, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi. Kemiskinan adalah problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban, sehingga tingkat kemiskinan harus mengalami penurunan disetiap tahunnya didukung dengan cara berubahnya faktor-faktor penyebab kemiskinan ke arah yang lebih baik.

Perkembangan tingkat persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia selama tahun 2010 hingga tahun 2017 akan dijabarkan pada Grafiki 1.1



Grafik 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin yang ada di Indonesia tahun 2010-2017

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Berdasarkan Grafik 1 jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2017 cenderung mengalami penurunan yang. Dapat dilihat pada Grafik 1, persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu delapan tahun turun sebesar 2.95 persen. Hal serupa juga terjadi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2017, dimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sebesar 1.84 persen.

Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal sebagai daerah tujuan pariwisata, sektor pariwisata menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Bali (Yasa dan Arka, 2015). Namun Provinsi Bali masih menghadapi masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin yang tergolong masih cukup tinggi. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya. Oleh karena itu kemiskinan harus segera diatasi oleh setiap daerah khususnya di Provinsi Bali mengingat tingkat kemiskinan merupakan indikator utama dalam keberhasilan pembangunan baik daerah maupun nasional (Murdiansyah, 2014). Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Bali tahun 2013-2017.

Tabel 1.
Persentase Jumlah Penduduk Miskin yang ada di Provinsi Bali tahun 2013/-
2017 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Persen)					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jembrana	5.56	5.83	5.84	5.33	5.38	5.59
Tabanan	5.21	5.61	5.52	5	4.92	5.25
Badung	2.46	2.54	2.33	2.06	2.06	2.29
Gianyar	4.27	4.57	4.61	4.44	4.46	4.47
Klungkung	7.01	7.01	6.91	6.35	6.29	6.71
Bangli	5.45	5.86	5.73	5.22	5.23	5.50
Karangasem	6.88	7.3	7.44	6.61	6.55	6.96
Buleleng	6.31	6.79	6.74	5.79	5.74	6.27
Denpasar	2.07	2.21	2.39	2.15	2.27	2.22
Provinsi Bali	4.49	4.76	4.74	4.25	4.25	4.50

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 1 menunjukkan selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 hingga pada tahun 2017, Kabupaten Karangasem memiliki rata-rata persentase jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 6.96 persen. Jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Karangasem, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan kerja (Purba dan Aswitari, 2016). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Putri dan Setiawan (2013), dan Aimon (2012) yang menyatakan bahwa pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Rata-rata persentase penduduk miskin terendah disandang

oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2.22 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 2.29 persen dan Kabupaten Gianyar sebesar 4.47 persen. Rendahnya persentase penduduk miskin di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung disebabkan oleh perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat sehingga masyarakat memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi dan berdampak positif pada pendapatan yang diperolehnya. Pernyataan tersebut juga dibuktikan oleh Patera dan Suardana (2015) dalam penelitiannya, yang memperoleh hasil bahwa perkembangan sektor pariwisata memiliki hubungan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Nowak (2007), Fayissa (2009), Narayan (2010), dan Vanegas (2015) yang menyatakan pertumbuhan sektor pariwisata yang memadai mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar serta membuka lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan disuatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik khusus dalam hal ini Provinsi Bali. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Provinsi Bali tahun 2012/ 2017
Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali (Persen)					Rata- Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jembrana	5.69	6.05	6.19	5.96	5.31	5.84
Tabanan	6.45	6.53	6.19	6.14	5.38	6.14
Badung	6.82	6.98	6.24	6.81	6.11	6.59
Gianyar	6.82	6.8	6.3	6.31	5.5	6.35
Klungkung	6.05	5.98	6.11	6.28	5.34	5.95
Bangli	5.94	5.83	6.16	6.24	5.35	5.90
Karangasem	6.16	6.01	6	5.92	5.08	5.83
Buleleng	7.15	6.96	6.07	6.02	5.4	6.32
Denpasar	6.96	7	6.14	6.51	6.08	6.54
Provinsi Bali	6.69	6.73	6.03	6.32	5.59	6.27

Sumber: BPS Provinsi Bali 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi periode 2013 sampai 2017 setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami penurunan, dimana Kabupaten Karangasem memiliki rata-rata tingkat laju pertumbuhan ekonomi terendah yakni sebesar 5.83 persen. Sedangkan Kabupaten Badung memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yakni sebesar 6.59 persen dan diikuti oleh Kota Denpasar sebesar 6.54 persen dan Kabupaten Gianyar yakni sebesar 6.37 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakmerataan persebaran laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali periode 2013 hingga 2017.

Faktor penentu yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan adalah tersedianya jumlah sumber daya manusia yang ada di masing masing daerah, penambahan penduduk akan meningkatkan tenaga kerja, dan secara langsung penambahan tersebut akan mempengaruhi jumlah output setiap daerah (Raharjo, 2006). Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja agar dapat menghasilkan

barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Ningrum (2018), tenaga kerja yang telah memiliki pekerjaan serta mampu berperan secara aktif mampu memberikan kontribusi yang baik dalam pertumbuhan ekonomi. Berikut ini disajikan data Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2013-2017

Tabel 3.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (Orang)

Kabupaten/Kota	Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Orang)					
	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Jembrana	135,611	142,086	142,434	144,733	162,665	145,506
Tabanan	262,044	262,006	264,113	268,754	246,754	260,734
Badung	325,012	322,913	338,816	338,816	343,229	333,757
Gianyar	262,409	265,787	283,779	283,779	300,370	279,225
Klungkung	99,416	100,803	104,130	104,130	103,972	102,490
Bangli	140,122	143,857	135,709	138,082	142,559	140,066
Karangasem	242,195	240,451	241,983	247,289	238,742	242,132
Buleleng	345,423	333,594	345,326	345,326	358,107	345,555
Denpasar	429,844	461,135	468,515	485,724	501,909	469,425
Provinsi Bali	2,242,076	2,272,632	2,324,805	2,356,633	2,398,307	2,318,891

Sumber: BPS Provinsi Bali 2018

Tabel 3 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dari tahun 2013-2017 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali cenderung mengalami fluktuasi dimana Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja yang cukup tinggi yakni sebesar 469,425 orang, sementara Kabupaten Klungkung memiliki persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terendah yakni sebesar 102,490 orang. Berdasarkan penelitian Fauzan (2015) dan Lubis (2014) mengatakan hal yang sama seperti penelitian-penelitian sebelumnya dimana tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin penduduk produktif

maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, selain itu juga jumlah penduduk yang di imbangi dengan sumber daya manusia yang telah terdidik akan membantu membangun pemerintah daerah.

Tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan, peran swasta juga diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi seperti akumulasi modal swasta yang secara langsung memiliki nilai investasi dan output yang besar sehingga dapat mendorong pendapatan masyarakat (Rahardjo, 2006). Sektor swasta memiliki peran dalam perekonomian daerah seperti menanamkan modalnya di daerah tertentu, sehingga dapat memunculkan lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut Sukirno (2007:107) bahwa investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Pada kenyataan bahwa investasi merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Adnan, 2010). Investasi adalah komitmen dana, langsung atau tidak langsung, untuk satu atau lebih aset dengan harapan untuk meningkatkan kekayaan masa depan (Lutfi, 2010). Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya *et al.*, 2012). Adapun realisasi PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam pada tahun 2013/2017 ditunjukkan seperti Tabel 4.

Tabel 4.
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Bali pada tahun 2013/2017
Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Realisasi PMDN Provinsi Bali					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jembrana	80,267	215,646	191,799	4,652,613	274,569	1,082,979
Tabanan	108,928	98,540	178,116	4,397,145	60,697	968,685
Badung	3,126,279	1,658,995	2,967,016	517,536	1,011,839	1,856,333
Gianyar	1,134,498	430,417	1,065,721	810,558	525,865	793,412
Klungkung	23,954	65,372	118,145	409,229	2,881,329	699,606
Bangli	21,252	23,128	30,780	15,652	26,451	23,453
Karangasem	163,429	78,406	92,344	1,015,270	223,119	314,514
Buleleng	201,727	259,707	337,596	212,579	1,122,983	426,918
Denpasar	2,932,781	1,016,228	1,402,615	27,058	5,666,227	2,208,982
Provinsi Bali	7,793,115	3,846,439	6,384,132	12,057,640	11,793,079	8,374,881

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bali dari tahun 2013-2017, mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat, dimana Kabupaten Bangli merupakan daerah terendah dalam realisasi PMDN di Provinsi Bali yakni sebesar 23,453 juta rupiah. Sedangkan Kota Denpasar merupakan daerah dengan realisasi PMDN tertinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 2,208,982 juta rupiah. Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang memiliki pusat perekonomian, pemerintahan, pendidikan, informasi, pusat kajian sejarah, seni, dan budaya. Sementara Kabupaten Bangli memiliki rata-rata tingkat investasi swasta terendah yaitu sebesar Rp. 23.737 juta rupiah, ini disebabkan karena di Kabupaten Bangli memiliki permasalahan dalam proses penerbitan perizinan. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini ,salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan investasi di Kabupaten Bangli agar lebih cepat dan mudah. Selain itu, manfaat adanya investor yang berinvestasi, tentu akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di Kabupaten Bangli.

Mengingat pentingnya peranan faktor-faktor tersebut terhadap pengentasan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, maka penelitian mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Bali penting untuk dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan berhasil tidaknya pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menghasilkan pendapatan tambahan atau kesejahteraan publik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah yang terus menunjukkan peningkatan maka menggambarkan bahwa perekonomian negara atau daerah tersebut berkembang dengan baik khususnya dalam hal ini Provinsi Bali. Faktor penentu yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan adalah ketersediaan sumber daya manusia di masing-masing daerah, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan jumlah tenaga kerja, dan secara langsung peningkatan tersebut akan mempengaruhi jumlah output di masing-masing daerah (Raharjo, 2006). Berdasarkan penelitian Fauzan (2015) dan Lubis (2014) mengatakan hal yang sama seperti penelitian sebelumnya di mana jumlah tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang produktif adalah harapan pemerintah daerah, penduduk yang lebih produktif, semakin besar peluang lapangan kerja yang diciptakan, selain itu penduduk yang seimbang dengan sumber daya manusia yang berpendidikan akan membantu membangun pemerintah daerah. Tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan,

peran sektor swasta juga diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi seperti akumulasi modal swasta yang secara langsung memiliki investasi besar dan nilai output sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Rahardjo, 2006). Menurut Sukirno (2007: 107) bahwa investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran untuk investor atau perusahaan untuk membeli barang modal dan peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Padahal, investasi merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Adnan, 2010). Investasi adalah mata rantai yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya *et al.*, 2012).

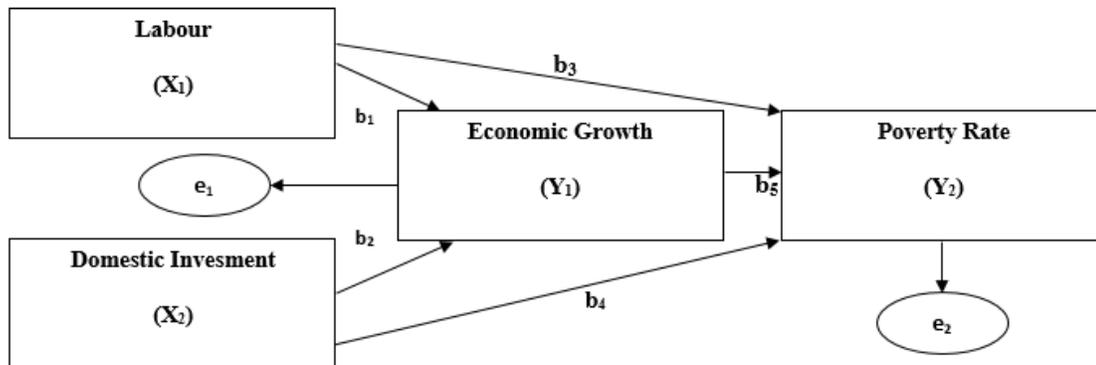
Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis di tingkat nasional dan regional, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasinya (Margareni dkk.,2016). Terutama di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh orang-orang yang bekerja di pertanian (Yusuf dan Andy Sumner, 2015). Program pembangunan yang dilakukan sejauh ini telah memberikan perhatian besar pada upaya pengentasan kemiskinan. Namun demikian, masalah kemiskinan masih merupakan masalah yang belum terpecahkan.

Investasi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, karena pembentukan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini memperluas peluang kerja (Todaro, 2000:137-138). Investasi juga dapat diartikan

sebagai pengeluaran atau pengeluaran investor atau perusahaan untuk membeli barang modal dan peralatan untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Mankiw, 2009: 122). Menurut Ocaya *et al.*, (2012) investasi adalah hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan, karena investasi yang masuk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah itu. Ini juga didukung oleh penelitian Arshanti (2015) yang menyatakan bahwa secara tidak langsung variabel investasi telah berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Menurut Yilmaz (2014), investasi dalam negeri (PMDN) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Keshava (2008), Adams (2009), Reza, *et. al* (2016) yang menyatakan bahwa investasi dalam negeri lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan investasi asing.

Menurut Pegkas (2014) jumlah tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting produksi dalam proses pertumbuhan ekonomi, karena produktivitas faktor produksi lainnya tergantung pada produktivitas jumlah tenaga kerja dalam memproduksi produksi. Salah satu cara untuk meningkatkan output adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Namun, peningkatan jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan peningkatan jumlah modal dan teknologi sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Salah satu indikator jumlah tenaga kerja yang mencerminkan ukuran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi adalah dengan menggunakan data Angka Partisipasi Angkatan Kerja. Ini didukung oleh penelitian

Pratama (2016) dan Barimbing (2015) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Kerangka konseptual adalah seperti yang dijelaskan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1.
Model Analisis Jalur Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, hipotesisnya adalah sebagai berikut;

- 1) Jumlah tenaga kerja dan PMDN berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 2) Jumlah tenaga kerja, PMDN, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 3) Pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh jumlah tenaga kerja dan PMDN terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu dalam bentuk asosiatif (hubungan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Jumlah titik pengamatanyang digunakan sebanyak 45 titik pengamatan selama 5 tahun dari 2013 hingga 2017 pada 9 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode *observasi non partisipan*, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat dokumen yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga kerja (man power) adalah bagian besarnya dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Samuel dan Nordhaus (2001) mengatakan bhwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitias dan ketrampilan tenaga kerja. banyak ekonom percaya bahwa kualitas inut tenaga kerja merupakan elemen paling dasar dalam suaut pertumbuhan ekonom. Kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya hal tersebut terlihat dari Tabel 4 berikut ini

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017 (dalam orang)

Kabupaten/Kota	Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Orang)					
	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Jembrana	135,611	142,086	142,434	144,733	162,665	145,506
Tabanan	262,044	262,006	264,113	268,754	246,754	260,734
Badung	325,012	322,913	338,816	338,816	343,229	333,757
Gianyar	262,409	265,787	283,779	283,779	300,370	279,225
Klungkung	99,416	100,803	104,130	104,130	103,972	102,490
Bangli	140,122	143,857	135,709	138,082	142,559	140,066
Karangasem	242,195	240,451	241,983	247,289	238,742	242,132
Buleleng	345,423	333,594	345,326	345,326	358,107	345,555
Denpasar	429,844	461,135	468,515	485,724	501,909	469,425
Provinsi Bali	2,242,076	2,272,632	2,324,805	2,356,633	2,398,307	2,318,891

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 5 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dari tahun 2013-2017 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali cenderung mengalami fluktuasi dimana Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja yang cukup tinggi yakni sebesar 469,425 orang, sementara Kabupaten Klungkung memiliki persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terendah yakni sebesar 102,490 orang. Hal tersebut diakibatkan karena kota Denpasar merupakan pusat perekonomian di Provinsi Bali.

Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan adanya investasi maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang ada di Provinsi Bali. Investasi perlu dilakukan secara merata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pemerataan investasi perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

terutama di daerah pedesaan. Investasi yang ada di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini ditampilkan Tabel 6.

Tabel 6.
Realisasi PMDN Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Bali tahun 2013-2017
(dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Realisasi PMDN Provinsi Bali					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jembrana	80,267	215,646	191,799	4,652,613	274,569	1,082,979
Tabanan	108,928	98,540	178,116	4,397,145	60,697	968,685
Badung	3,126,279	1,658,995	2,967,016	517,536	1,011,839	1,856,333
Gianyar	1,134,498	430,417	1,065,721	810,558	525,865	793,412
Klungkung	23,954	65,372	118,145	409,229	2,881,329	699,606
Bangli	21,252	23,128	30,780	15,652	26,451	23,453
Karangasem	163,429	78,406	92,344	1,015,270	223,119	314,514
Buleleng	201,727	259,707	337,596	212,579	1,122,983	426,918
Denpasar	2,932,781	1,016,228	1,402,615	27,058	5,666,227	2,208,982
Provinsi Bali	7,793,115	3,846,439	6,384,132	12,057,640	11,793,079	8,374,881

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 6 menunjukkan bahwa Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bali dari tahun 2013-2017, mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat, dimana Kabupaten Bangli merupakan daerah terendah dalam realisasi PMDN di Provinsi Bali yakni sebesar 23,453 juta rupiah. Sedangkan Kota Denpasar merupakan daerah dengan realisasi PMDN tertinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 2,208,982 juta rupiah. Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang memiliki pusat perekonomian, pemerintahan, pendidikan, informasi, pusat kajian sejarah, seni, dan budaya. Sementara Kabupaten Bangli memiliki rata-rata tingkat investasi swasta terendah yaitu sebesar Rp. 23.737 juta rupiah, ini disebabkan karena di Kabupaten Bangli memiliki permasalahan dalam proses penerbitan perizinan. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan investasi di Kabupaten Bangli agar lebih cepat

dan mudah. Selain itu, manfaat adanya investor yang berinvestasi, tentu akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di Kabupaten Bangli.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama antara para pelaku ekonomi yaitu pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat dalam pengembangan kesempatan kerja dan kebijakan. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali
(dalam persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali (Persen)					Rata- Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jembrana	5.69	6.05	6.19	5.96	5.31	5.84
Tabanan	6.45	6.53	6.19	6.14	5.38	6.14
Badung	6.82	6.98	6.24	6.81	6.11	6.59
Gianyar	6.82	6.8	6.3	6.31	5.5	6.35
Klungkung	6.05	5.98	6.11	6.28	5.34	5.95
Bangli	5.94	5.83	6.16	6.24	5.35	5.90
Karangasem	6.16	6.01	6	5.92	5.08	5.83
Buleleng	7.15	6.96	6.07	6.02	5.4	6.32
Denpasar	6.96	7	6.14	6.51	6.08	6.54
Provinsi Bali	6.69	6.73	6.03	6.32	5.59	6.27

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 7 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi periode 2013 sampai 2017 setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami penurunan, dimana Kabupaten Karangasem memiliki rata- rata tingkat laju pertumbuhan ekonomi terendah yakni sebesar 5.83 persen. Sedangkan Kabupaten Badung memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yakni sebesar 6.59 persen dan diikuti

oleh Kota Denpasar sebesar 6.54 persen dan Kabupaten Gianyar yakni sebesar 6.37 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakmerataan persebaran laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali periode 2013 hingga 2017.

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, ini terbukti dari menurunnya tingkat kemiskinan yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017 Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki persentase tingkat kemiskinan yang paling sedikit dibandingkan dengan daerah lain yaitu sebesar 2,06 persen untuk Kabupaten Badung dan 2,27 untuk Kota Denpasar. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Persentase penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali
(dalam persen)

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Persen)					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jembrana	5.56	5.83	5.84	5.33	5.38	5.59
Tabanan	5.21	5.61	5.52	5	4.92	5.25
Badung	2.46	2.54	2.33	2.06	2.06	2.29
Gianyar	4.27	4.57	4.61	4.44	4.46	4.47
Klungkung	7.01	7.01	6.91	6.35	6.29	6.71
Bangli	5.45	5.86	5.73	5.22	5.23	5.50
Karangasem	6.88	7.3	7.44	6.61	6.55	6.96
Buleleng	6.31	6.79	6.74	5.79	5.74	6.27
Denpasar	2.07	2.21	2.39	2.15	2.27	2.22
Provinsi Bali	4.49	4.76	4.74	4.25	4.25	4.50

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 8 menunjukkan selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 hingga pada tahun 2017, Kabupaten Karangasem memiliki rata-rata persentase jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 6,96 persen. Jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Karangasem, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan kerja (Purba dan Aswitari, 2016). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Putri dan Setiawan (2013), dan Aimon (2012) yang menyatakan bahwa pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Rata-rata persentase penduduk miskin terendah disandang oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,22 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 2,29 persen dan Kabupaten Gianyar sebesar 4,47 persen. Rendahnya persentase penduduk miskin di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung disebabkan oleh perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat sehingga masyarakat memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi dan berdampak positif pada pendapatan yang diperolehnya. Pernyataan tersebut juga dibuktikan oleh Patera dan Suardana (2015) dalam penelitiannya, yang memperoleh hasil bahwa perkembangan sektor pariwisata memiliki hubungan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Nowak (2007), Fayissa (2009), Narayan (2010), dan Vanegas (2015) yang menyatakan pertumbuhan sektor pariwisata yang memadai mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar serta membuka lapangan pekerjaan.

Untuk mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan nilai varians dari variabel pertumbuhan ekonomi yang tidak dijelaskan oleh variabel jumlah tenaga kerja dan PMDN, dihitung dengan menggunakan rumus

$$e_1 = \sqrt{(1 - R_i^2)}$$

$$e_1 = \sqrt{(1 - 0.312)}$$

$$e_1 = 0.830$$

Sementara itu, untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan nilai varians dari variabel tingkat kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh variabel jumlah tenaga kerja, PMDN, dan pertumbuhan ekonomi, maka dihitung menggunakan rumus

$$e_2 = \sqrt{(1 - R_i^2)}$$

$$e_2 = \sqrt{(1 - 0.553)}$$

$$e_2 = 0.669$$

Untuk memeriksa validitas model, ada indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi dari total hasil sebagai berikut

$$R_m^2 = 1 - (0.830)^2(0.669)^2$$

$$R_m^2 = 0.691$$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, ditemukan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah 69,1 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 69,1 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 30,9 persen sisanya tidak terdapat dalam model.

Tabel 9.
Hasil Analisis Path Struktur I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(constant)	.839	.229		3.656	.001
	Jumlah Tenaga Kerja	.083	.021	.590	4.037	.000
	PMDN	-.003	.005	-.073	-.502	.618

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa persamaan struktur 1:

$$\hat{Y}_1 = 0.590X_1 - 0.073X_2$$

Berdasarkan Tabel 9, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja dengan nilai signifikansi 0,000 <0,05 dan *Standardized Coefficients* sebesar 0,590 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini didukung oleh penelitian Pratama (2016) dan Barimbing (2015) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PMDN dengan nilai signifikansi 0,618 > 0,05 dan *Standardized Coefficients* - 0,073 menunjukkan bahwa PMDN tidak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahfud (2016) dan Asiyani (2013) dimana PMDN secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Sulistiawati (2012), investasi dapat berdampak negatif terhadap suatu perekonomian diakibatkan oleh beberapa hal salah satunya ada persebaran investasi yang tidak merata. Berdasarkan data empiris selama periode 2013-2017, persebaran Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di

Provinsi Bali masih sangat timpang antar Kabupaten/Kota, dimana terdapat *gap* yang cukup jauh antara daerah satu dengan daerah lainnya di Provinsi Bali. Angka investasi tersebut lebih didominasi pada sektor, perhotelan dan restoran.

Pengujian Persamaan 2 dilakukan untuk melihat efek jumlah tenaga kerja, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara langsung menggunakan program SPSS 18. Kemudian hasil persamaan regresi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10.
Hasil Analisis Path Struktur II

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	9.960	1.321		7.542	.000
	Jumlah Tenaga Kerja	-0.394	0.122	-0.455	-3.242	.002
	PMDN	-0.042	0.027	-0.189	-1.580	.122
	Pertumbuhan Ekonomi	-1.640	0.774	-0.267	-2.120	.040

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa persamaan struktur 2:

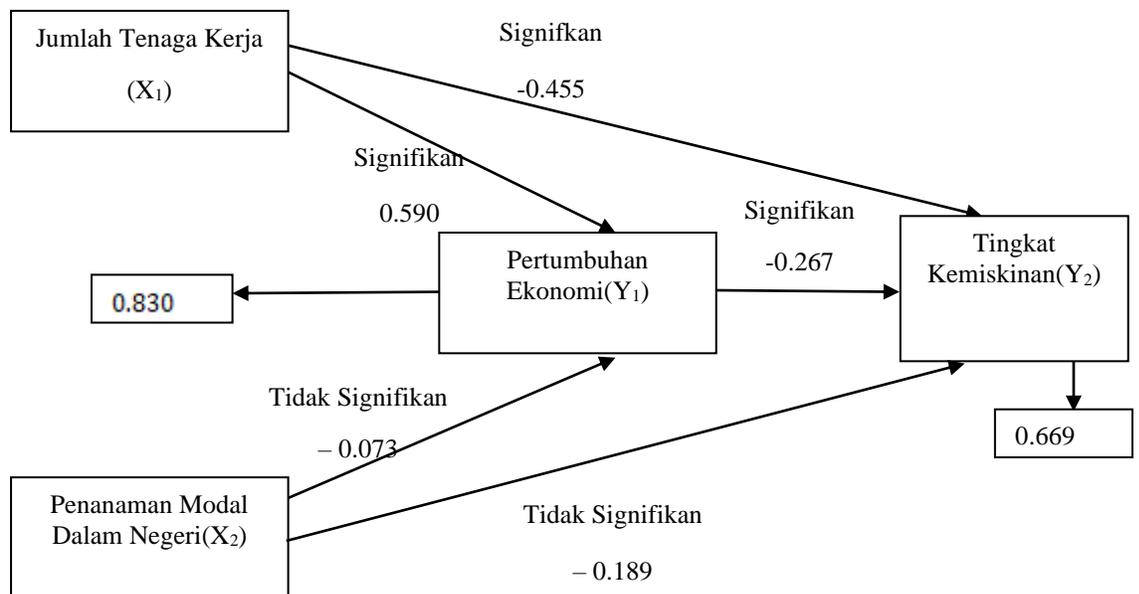
$$\hat{Y}_2 = -0,455X_1 - 0,189X_2 - 0,267Y_1$$

Berdasarkan Tabel 10, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 dengan *Standardized Coefficients* -0,455, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya Ratih (2017) yang menyatakan bahwa secara parsial jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah SARBAGITA Provinsi Bali. PMDN dengan nilai signifikansi 0,122 > 0,05 dengan *Standardized Coefficients* -

0,189, menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Agustini (2016) dimana Penanaman Modal Dalam Negeri memberikan dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi $0,040 < 0,05$ dan *Standardized Coefficients* $-0,267$, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Purnama (2017) dan Arini (2015) dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan *Standardized Coefficient* 0.590 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui Pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi $0.040 < 0.05$ dengan *Standardized Coefficient* -0.267 , menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan jumlah tenaga kerja dengan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ dengan *Standardized Coefficient* -0.455 , menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbukti memediasi pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Sunusi dkk., (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi tenaga kerja

terhadap tingkat kemiskinan. Artinya jumlah tenaga kerja mampu mengurangi angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan perekonomian. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi untuk memenuhi pasar domestik yang meningkat Dengan banyaknya barang yang jasa yang dibutuhkan maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin meningkat. Meningkatnya tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa dapat mengurangi pengangguran yang secara tidak langsung mengurangi jumlah penduduk miskin



Gambar 2.
Model Analisis Jalur Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Bali

Tabel 10.
Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Total
Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Hubungan Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Langsung Melalui Y ₁	Tidak Langsung Melalui Y ₁	Pengaruh Total
Pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi	0.590	-	-	0.698
Pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan	-0.455	-0.157	-	-0.612
Pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi	-0.073	-	-	-0.306
Pengaruh PMDN terhadap tingkat kemiskinan	-0.189	-0.019	-	-0.208
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan	-0.267	-	-	-0.284

Sumber: Data diolah, 2019

SIMPULAN

Jumlah jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Artinya dengan semakin tinggi Jumlah jumlah tenaga kerja maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Artinya PMDN belum berpengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Jumlah jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jumlah jumlah tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Investasi hendaknya diarahkan pada Kabupaten/Kota di luar wilayah Sarbagita yang memiliki investasi fisik yang rendah sehingga alokasi investasi tidak terpusat pada daerah tertentu dan alokasi investasi juga diharapkan merata di semua sektor.

REFERENSI

- Adnan, P. Eko Prasetyo. (2010). Investment On The Community Income And The Economic Growth In Central Java. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura Volume 13*. Universitas Negeri Malang.
- Agustini, Yetty, Erni Panca Kurniasih. (2017). Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Jumlah tenaga kerja Terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *E-Jurnal Untan*, 6(2), hal. 97-119.
- Aimon, Hasdi. (2012). Produktivitas, Investasi Sumber Daya Manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 209-218.
- Arini, Made, Dwi Setyadi Mustika. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal EP Unud*, 4(9), 1140-1163.
- Arshanti, Kadek Novita dan I. G. A. P. Wirathi. (2015). Pengaruh Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4 (5), 513-524.
- Asiyan, Sri. (2013). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 1(3) 1-18.
- Astriani, Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8).

Badan Pusat Statistik. (2018). *Bali Dalam Angka*. Denpasar: BPS.

----- (2013). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.

----- (2014). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.

----- (2015). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.

----- (2016). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.

----- (2017). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.

Balisacan AM, Pernia EM, Asra A. (2003). Revisiting Growth and Poverty Reduction in Indonesia : What Do Subnational Data Show? . *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(3), 329- 351.

Barimbing, Yesika Resianna dan Ni Luh Karmini. (2015). Pengaruh Pad, Jumlah tenaga kerja, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4 (5), 434-450.

Budhi, Made Kembar Sri. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Bali : Analisis FEM Data Panel. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 1-6.

Fauzan, Alfian Wahyu. 2015. Analisis Pengaruh Investasi, Jumlah tenaga kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Fajrii, Muhammad. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 99-107. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v09.i02.p02>.

Fayissa, B., Nsiah, C. and Tadesse, B. (2009). Tourism And Economic Growth In Latin American Countries (Lac): Further Empirical Evidence. Department of Economics and Finance Working Paper Series, Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN.

Fitriani, Nurul. (2017). Pengaruh Jumlah tenaga kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY Tahun 2007-2015. *E-Journal UNY*, hal. 42-50.

Keshava, S.R. (2008). The effect of FDI on India and Chinese Economy; A comparative analysis. <https://www.ssrn.com/abstract=1089964>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018.

- Lubis, Citra Ayu Bsica Effendy. (2014). Pengaruh JumlahJumlah tenaga kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Economia Universitas Negeri Yogyakarta*, 10(2), 187-193.
- Mahfud. (2016). Pengaruh Investasi Dan Kualitas Jumlah tenaga kerja Terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi Di Indonesia Tahun 2009 Sampai Dengan 2015. *E-Jurnal Untan*, hal. 1-23.
- Mankiw, N. Gregory. (2009). Teori Makro Ekonomi, Edisi Ke Empat, Erlangga: Jakarta.
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama, I Ketut Djayastra, I.G.W Murjana Yasa. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA UNUD*, 12(1), 101-110.
- Murdiansyah, Isnan. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang), *Jurnal Wiga*, 4 (1), hal. 71-92.
- Narayan, P.K., S., Prasad, A. and Prasad, B.C. (2010), Tourism and economic growth: a panel data analysis for Pacific Island countries. *Journal Tourism Economics*, 16 (1), 169-183.
- Nizar, Chairul. (2013). Pengaruh Investasi Dan Jumlah tenaga kerja Terhadap Pertumbuhan ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Nowak, J.J., Sahli, M. dan Corte's-Jime'nez, I. (2007). Tourism, capital good imports and economic growth: theory and evidence for Spain. *Journal Tourism Economics*, 13 (4), 515-536.
- Ocaya, Bruno, Charles Runanga & Wiliam Kaberuka. (2012). Dynamic Relationship between Gross Domestic Product & Domestic Investment in Rwanda .*World Journal of Education*, 2 (6), Makerere University, Uganda.
- Patera dan Suandana. (2015). Model Hubungan Pariwisata, Kinerja Perekonomian dan Kemiskinan di Kabupaten Badung, Bali. *PIRAMIDA UNUD*, 11(2), 131-141.

- Pegka, Panagiostis. (2014). The Link Between Educational Level and Economic Growth: A Neoclassical Approach for the Case of Greece. *International Journal of Applied Economics*, 11(2), 38-54.
- Pratama, Rizky, Prof. Dr. Paulus Kindangen, Een N. Walewangko. (2016). Analisis Pengaruh Investasi, Jumlah tenaga kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Propinsi Sulawesi Utara. *E-Journal Unsrat*, hal. 1-17.
- Purba, Yofa Selvida Theresia dan Aswitari. (2016). Pengaruh Peran Sektor Non Pertanian, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan. *E- Jurnal EP Unud*, 5(70), 799-824.
- Purnama, Nadia Ika. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara. *E-journal UMSU*, hal. 62-70.
- Putra dan Sri Budhi. (2015). Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, hal. 183-196.
- Putri, Arya Dwiandana dan Djinar Setiawina. (2013). Pengaruh Umur, Pendidikan, Perkerjaan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Bebandem. *E-Jurnal EP Unud* , 2(4), 173-180.
- Rahardjo, Sapto. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan (Panduan Investasi Saham)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ratih, Gusti Ayu Ambara, Made Suyana Utama, I Nyoman Mahaendra Yasa. (2017). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah tenaga kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(1), 29-54.
- Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)*, 8(1), 9-16.

- Seran, Srilius. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 59-71. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p07>.
- Suartha, Nyoman dan I Gst Wayan Murjana Yasa. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 95-107.
- Sianturi, Sahat m t. (2011). Analisis Determinan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatra. *Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Sjafii, Ahmad, (2009). Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 1990 – 2004 *Journal of Indonesia Applied Economics*, 3(1), 59 – 76.
- Sukirno, Sadono. (2007). Makro Ekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Raja Grafindo Pustaka.
- Sunusi, Dewi Kurniawati, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu. (2014). Analisis Pengaruh JumlahJumlah tenaga kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 120-137.
- Suryahadi, Asep, Gracia Hadiwidjaja, dan Sudarno Sumarto. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia. *Bulletin of Indoneisan Economic Studies*, 48(2), 209 -227.
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Vanegas, M. (2014). The triangle of poverty, economic growth, and inequality in Central America: Does tourism matter?.https://mpr.ub.uni-muenchen.de/65328/1/MPRA_paper_93528.pdf. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
- Yasa, I Komang Oka Artana dan Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), hal. 63-71.

Yilmaz, B. (2014). Effects of Foreign Direct Investment inflows and Domestic Investment on Economic Growth: Evidence from Turkey. *Internal Journal of Economics and Finance*, 6 (4), 75-95.

Yudha, Okta Ryan Pranata. (2013). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Yusuf, Arief Anshory and Andy Sumner. (2015). Growth, Poverty and Inequality UnderJokowi. *Bulletin of Indoneisan Economic Studies*. 51(3).